

PERGANTIAN KEKUASAAN DI INDONESIA TAHUN 1800

A. Kardiya Wiharyanto

A. Pendahuluan

Masa penjajahan Belanda di Indonesia dapat dibagi dalam dua periode yaitu periode tahun 1602 sampai 1799, dan periode tahun 1800 sampai 1942. Periode pertama yaitu antara tahun 1602 sampai 1799, Indonesia di bawah persekutuan dagang Belanda. Persekutuan dagang itu dibentuk tahun 1602, dan merupakan hasil penyatuan atau merger beberapa serikat dagang di Belanda. Serikat dagang ini bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).

Kepada serikat dagang ini, pemerintah Belanda memberikan hak-hak istimewa. Hak istimewa tersebut antara lain hak monopoli perdagangan, hak mencetak uang sendiri, hak mengumumkan perang, dan hak untuk membuat perjanjian dengan penguasa lain. Dengan status seperti sebuah negara ini, VOC memiliki otonomi sendiri untuk bertindak. Untuk mendukung otonomi tersebut, VOC dilengkapi dengan pasukan bersenjata.

Di Indonesia, VOC pertama kali berpusat di Ambon. Gubernur Jenderal pertamanya adalah Pieter Both. Di bawah kepemimpinannya, VOC berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Namun, itu belum cukup bagi VOC sebab Malaka sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara masih dikuasai Portugis. Oleh karena itu, untuk menyingkirkan Portugis, Pieter Both merasa perlu memindahkan pusat kegiatan VOC dari Ambon ke Jayakarta.

Ketika itu Jayakarta dikuasai Banten. Jayakarta dipilih karena Portugis telah mendirikan kantor perdagangannya di sana. Selain itu, letaknya strategis di jalur perdagangan Asia. Setelah mendapat persetujuan dari Pangeran Jayakarta, VOC mendirikan kantor dagangnya di Jayakarta. Mereka juga mendirikan benteng bernama Batavia. Perpindahan pusat VOC ke Jayakarta terjadi pada masa Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen.

Kehadiran VOC di Jayakarta tentu membawa akibat persaingan antara VOC dan Portugis. Namun dengan kelicikannya, VOC berhasil mempengaruhi penguasa Banten untuk mencabut hak dagang Portugis

Drs. A.K. Wiharyanto, M.M., adalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP - Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

di wilayahnya. Sejak tanggal 31 Mei 1619, VOC memperoleh hak monopoli penuh atas Jayakarta. Sejak saat itu pula nama Jayakarta diganti Batavia.

Dari Batavia, VOC terus memperluas pengaruhnya ke wilayah lain di Indonesia. Dengan kelecikan dan kekuatan militernya, VOC akhirnya menjadi satu-satunya serikat dagang Eropa yang bisa menguasai hampir seluruh wilayah nusantara. Perluasan pengaruh politik VOC umumnya dilakukan dengan perjanjian-perjanjian yang mengikat. Perjanjian ini dicapai setelah ada konflik, yaitu antara VOC dengan penguasa setempat, antarpenguasa (salah satu penguasa kemudian minta bantuan VOC), atau antara VOC dengan serikat dagang Eropa lainnya.

Sejak menguasai perdagangan di Indonesia, sebenarnya VOC terus menerus menghadapi perlawanan dari rakyat. Perlawanan pertama dilakukan oleh Sultan Agung dari Mataram, kemudian Sultan Hasanudin dari Makasar, Sultan Ageng dari Banten, Untung Suropati, Trunojoyo, Raden Mas Said, dan Pangeran Mangkubumi. Akibatnya beban VOC dari waktu ke waktu bertambah berat, sehingga tidak mampu lagi menjalankan pemerintahannya di Indonesia. Akhirnya sekitar tahun 1800 terjadi peralihan kekuasaan dari VOC ke pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengetahui sekitar pergantian kekuasaan di Indonesia tahun 1800, maka pada bagian berikut akan dibahas tentang latar belakang terjadinya pergantian kekuasaan, dan kondisi Indonesia setelah terjadi pergantian kekuasaan tahun 1800.

B. Latar Belakang Terjadinya Pergantian Kekuasaan

Seperti diungkapkan di atas bahwa bangsa Belanda datang ke Indonesia untuk berniaga. Mula-mula terdapat beberapa kongsi dagang yang menyediakan kapal-kapal, akan tetapi dalam tahun 1602 telah didirikan suatu *Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)* yaitu gabungan kongsi-kongsi dagang yang berlayar ke Indonesia atau Kongsi Dagang India Timur.¹ Tujuan pokoknya adalah mencari untung yang sebesar-besarnya.

Setelah berjalan lebih dari satu setengah abad, ternyata keuntungan yang diperoleh semakin kecil, kasnya semakin menipis, sedang anggaran belanja VOC semakin besar. Keadaan tersebut tidak semakin bertambah baik tetapi justru semakin merosot. Itulah sebabnya

¹ Prajudi Atmosudirdjo, *Sejarah Ekonomi Indonesia, dari Segi Sosiologi Sampai Akhir Abad XIX*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1984, hal. 60.

VOC akhirnya membubarkan diri pada tanggal 31 Desember 1799.²

Adapun sebab-sebab jatuhnya VOC itu adalah:

1. Sistem monopoli VOC dengan akibat-akibat yang merugikan.

Tujuan monopoli dagang ini adalah untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dari perdagangan. Karena VOC merupakan sebuah persekutuan dagang yang terdiri dari para pedagang dan pemegang saham, maka mereka sama sekali tidak memperhatikan kehidupan atau membuat kebaikan terhadap orang-orang pribumi. Sistem perdagangan seperti itu melemahkan perdagangan dan kekuasaan Belanda di Indonesia.

Akibat pemerintah Belanda tidak memperhatikan nasib rakyat jajahan, maka penduduk pribumi menjadi sangat miskin dan bodoh. Mereka tidak mampu membeli barang-barang produksi yang dijual oleh Belanda. Bahkan tidak jarang penduduk pribumi tidak mampu membeli beras dan bahan-bahan makanan lainnya yang akan dijual oleh Belanda.

Beberapa kebijaksanaan Belanda yang menyebabkan orang-orang Indonesia terus miskin:

a. Membeli murah, menjual mahal.

Belanda selalu membeli hasil bumi orang-orang Indonesia dengan harga murah, sedangkan bahan-bahan makanan, kain dan barang-barang lain dijual mahal kepada penduduk. Hal ini menyebabkan penduduk tanah jajahan terlalu miskin untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok itu. Belanda menjalankan sistem pembelian dan penjualan ini dengan tujuan untuk memperoleh barang-barang yang lebih banyak dibanding barang-barang yang dijualnya.

b. Menjaga jumlah barang yang dimonopoli.

Belanda terus berusaha menjaga barang-barang yang dimonopoli supaya harganya tidak merosot. Peraturan itu mereka jalankan agar permintaan pasar dan harga tetap seimbang. Jika permintaannya tinggi, maka pengeluaran dlebihkan dengan syarat harganya tidak jatuh. Biasanya hasil yang berlebihan dikurangi dengan menebang dan memusnahkan pohon-pohon, membakar atau mengubur hasil-hasil yang berlebihan itu supaya harganya tetap tinggi. Misalnya, jika kopi atau lada sangat dibutuhkan di Eropa, maka orang-orang Indonesia akan dipaksa menanam lebih banyak pohon-pohon kopi dan lada. Tanaman-tanaman ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk

² Gilbert Khoo, *Sejarah Asia Tenggara Sejak tahun 1500*, Kulalumpur, Penerbit Fajar Bakti SDN.BHD., 1976, hal. 19.

berbuah. Tetapi apabila sampai waktu bagi tanaman-tanaman ini berbuah, permintaan terhadapnya mungkin sudah jatuh. Kalau hal itu terjadi dan gudang-gudangnya masih penuh, maka kopi dan lada yang berlebihan itu akan dimusnahkan untuk mempertahankan harganya di Eropa. Sementara itu harga yang dibayar kepada penanam-penaman di Indonesia dikurangkan pula. Orang-orang Belanda itu sendiri pun tidak banyak mendapat faedah dari kebijaksanaan monopolinya itu sebab mereka tidak dapat melakukan monopoli secara optimal. Pedagang-pedagang Arab dan Inggris membanjiri pasar-pasar di Indonesia dengan kain-kain yang jauh lebih murah dari pada kain-kain Belanda. Hal ini menyebabkan harga barang-barang yang dijual Belanda menjadi sangat murah.

Pada pertengahan abad ke-18 barang-barang Belanda dijual dengan lebih mahal di pasarnya sendiri. Jika kekuasaan Inggris semakin kuat di India, maka mereka akan memperluas perdagangannya ke Indonesia pula. Sebelum abad ke-18 berakhir, Belanda terpaksa mengakui bahwa sistem monopolinya telah gagal.³

c. Kerjapaksa, penyelundupan dan perompakan di laut.

Agar bisa mengontrol secara ketat terhadap hasil yang berlebihan serta memperoleh tenaga yang murah, maka Belanda menganut cara pemerintahan di kerajaan-kerajaan tradisional di Indonesia, yaitu kerja paksa. Kerja paksa yang berlebihan, misalnya tempatnya jauh dan membutuhkan waktu yang lama, menyebabkan para petani tidak mungkin mengerjakan tanahnya sendiri. Sewaktu melakukan kerja paksa itu, para petani itu masih menyediakan makanannya sendiri, namun juga pernah menerima rangsum dari pemerintah Belanda.

Monopoli Belanda itu juga menyebabkan terjadinya penyelundupan dan perompakan di laut. Kedua peristiwa itu sangat merugikan perdagangan Belanda. Keuntungan yang diperoleh dari penyelundupan itu sangat besar dibanding dengan bahaya yang dihadapi. Di sisi lain, angkatan laut Belanda tidak mungkin mengawasi seluruh perbatasan laut dalam waktu yang sama. Ini berarti bahwa angkatan laut Belanda tidak cukup untuk mengawal monopoli Belanda.

Biasanya para penyelundup itu juga bertindak seperti bajak laut yang merompak kapal-kapal Belanda dan merampok kapal-kapal dagang Indonesia. Belanda kewalahan menghadapi masalah ini karena angkatan laut Belanda sangat terbatas.

³ Clive Day, *The Dutch in Java*, Kualalumpur, Offord University Press, 1966, hal. 51.

d. Menjaga monopoli terhadap tanaman-tanaman.

Di samping menjaga stok barang, Belanda juga menjaga tanaman-tanaman agar hasilnya tidak melebihi permintaan pasar, terutama tanaman rempah-rempah di Maluku, gula dari Jawa dan lada dari Aceh. Untuk menjaga tanaman rempah-rempah di Maluku, Belanda melakukan pelayaran Hongi yaitu pelayaran bersenjata untuk memusnahkan tanaman-tanaman rempah-rempah yang dianggap melanggar aturan.

Di samping biaya pengawasan juga mahal dan menimbulkan dendam dari penduduk yang dirusak tanamannya, di sisi lain Perancis dan Inggris menggalakkan penanaman pohon-pohon tersebut di tanah jajahan mereka. Tidak lama kemudian Sri Lanka dan di India sudah menghasilkan kayu manis dan bunga cengkih untuk orang-orang Inggris. Sedangkan tempat pengumpulan rempah-rempah Inggris di Bangkahulu dapat memperoleh rempah-rempah dari pedagang-pedagang setempat. Dengan demikian VOC sekali lagi mengalami kerugian.⁴

2. Cara kerja yang tidak efektif dan efisien.

Pada mulanya VOC itu dimaksudkan sebagai badan perdagangan semata-mata. Ada bukti yang menunjukkan bahwa ketika VOC betul-betul menjalankan usaha perdagangan, VOC mendapat keuntungan yang secukupnya. Tetapi setelah VOC itu berubah menjadi badan pemerintah, maka anggaran pemerintahan atas seluruh wilayah kekuasaannya melebihi keuntungan yang diperoleh. Oleh karena susunannya tidak baik, maka timbullah beberapa keburukan yang menyebabkan kerugian yang besar. Pegawai-pegawainya diangkat berdasarkan keinginan para pejabat VOC sehingga tidak berdasarkan profesinya.

Pegawai-pegawai yang tidak *the raight man on the raight place* tersebut hanya diberi gaji kecil dan diberi kesempatan untuk memperoleh tambahan gaji secara tidak resmi. Akibatnya terjadilah perdagangan pribadi dari pegawai yang paling rendah sampai Gubernur Jenderal.

Sementara pegawai-pegawai dan pejabat-pejabat VOC memperoleh banyak penghasilan, namun tidak seperti halnya dengan rakyat jajahan. Bagi pejabat VOC yang penting adalah bisa bersahabat dengan raja-raja setempat supaya memperoleh monopoli perdagangan.

⁴ Gilbert Khoo, *op. cit.*, hal. 20.

Itulah sebabnya perlawanan rakyat Indonesia tidak henti-hentinya sambung-menyambung mulai dari perlawanan Sultan Agung, Sultan Hasanudin, Trunajaya, Sultan Ageng, Untung Surapati, Raden Mas Said, dan Pangeran Mangkubumi.

Dengan adanya perlawanan dan penaklukan daerah-daerah baru menyebabkan kas VOC semakin berkurang. Namun gaji yang rendah juga mendorong terjadinya korupsi besar-besaran sehingga keuntungan VOC semakin habis. Jadi, para pegawai VOC semakin memperkaya diri sementara keuntungan VOC hanya cukup untuk mempertahankan kongsi dagang tersebut.

Ada beberapa cara bagi para pegawai VOC untuk memperkaya diri, yaitu:

- a. Karena jabatan-jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi dapat dibeli, maka pegawai-pegawai VOC itu dapat memegang dua jabatan atau lebih supaya gajinya lebih besar.
- b. Pegawai-pegawai VOC menjual barang-barang kepada VOC dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang dibayar kepada orang Indonesia.
- c. Mereka mencuri barang-barang dari gudang-gudang VOC dan membagi-bagikan barang-barang yang akan dikirim itu kepada sesama pegawai VOC.
- d. Sewaktu akan mengirim barang, timbangan-timbangan dilakukan secara tidak betul sehingga terjadi sisa barang yang kemudian dijadikan milik pribadi.
- e. Para pegawai itu berdagang barang-barang seperti beras dan candu yang telah ditetapkan oleh VOC sebagai barang-barang dagangan monopoli VOC.
- f. Mereka memungut sumbangan dari orang-orang Indonesia.
- g. Mereka menerima tips untuk pertolongan yang mereka berikan, walaupun sebenarnya itu tugas mereka.
- h. Mereka mempergunakan kemudahan-kemudahan VOC untuk menjalankan perdagangan pribadi.
- i. VOC mendapat bagian dari sisa-sisa yang telah dikorupsi oleh para pegawai. Pegawai-pegawai itu bersekongkol dengan orang-orang Indonesia untuk mengelabui VOC.

3. Saingan Perdagangan

Mula-mula Belanda menghadapi persaingan Portugis dan Inggris. Perdagangan Portugis akhirnya dapat dilumpuhkan, sehingga tinggal berbentuk perdagangan perorangan dan tidak membahayakan lagi. Sedangkan Inggris yang pada awalnya dapat didesak, namun karena menguasai jalur perdagangan Selat Malaka, maka akhirnya justru menjadi pesaing Belanda yang utama dari Eropa.

Pedagang-pedagang Inggris dan pedagang-pedagang Asia dapat masuk ke kawasan-kawasan perdagangan VOC. Mereka menawarkan harga-harga barang yang lebih murah, sehingga membahayakan perdagangan Belanda. Karena itu Belanda berusaha keras agar Inggris tidak memiliki wilayah perdagangan di Indonesia, akibatnya baru tahun 1795 Inggris memperoleh kedudukan di pulau Penang.

Di samping Inggris, orang-orang Bugis dengan pusat perdagangannya di Riau juga menjadi saingan yang hebat terhadap perdagangan Belanda. Perselisihan-perselisihan politik yang disebabkan oleh keikutsertaan Belanda di pihak Perancis dalam Perang Kemerdekaan Amerika (1774-1783), mengakibatkan semakin terancamnya kedudukan Belanda di Indonesia oleh Inggris. Pertempuran-pertempuran laut antara gabungan Inggris-Belanda melawan Perancis dalam tahun 1780-1784 semakin memperberat beban keuangan yang ditanggung Belanda.

4. Kemerostan Perdagangan VOC

Kemerostan ini tentu saja disebabkan oleh persaingan dari pedagang-perdagang lain dan juga sebagai akibat dari keburukan sistem monopoli VOC. Clive Day berpendapat bahwa saingan perdagangan merupakan sebab utama kemerostan perdagangan VOC dalam abad ke-18.⁵

Adapun sebab lain yang menyebabkan kemerostan perdagangan VOC itu adalah sistem monopoli. Perdagangan VOC mulai merosot dengan hebatnya pada permulaan abad ke-18, yaitu sewaktu Belanda memperoleh kekuasaan yang semakin luas di Indonesia sehingga mengubah dirinya dari dagang ke politik. Apabila VOC tetap pada tujuan aslinya yaitu dagang (membeli dan menjual di pasar-pasar terbuka), maka uangnya tidak habis untuk membiayai pemerintahan dan peperangan.

Pada pertengahan abad ke-18, Belanda di Jawa hampir-hampir

⁵ Clive Day, *op. cit.*, hal. 77

sudah gulung tikar, karena kehabisan kas. Untuk menghadapi bahaya kebangkrutan itu, Belanda meningkatkan usaha pengangkutan dan menggalakkan simpanan untuk meningkatkan modal agar mampu membiayai perdagangan internasional. Dengan demikian uang mulai terkumpul kembali.

Sistem pengangkutan dan simpanan ini didasarkan kepada kenyataan bahwa Belanda ialah tuan bagi orang-orang Indonesia dan mereka memerlukan tanaman-tanaman tertentu untuk dijual di pasar-pasar lain. Dengan demikian rakyat dipaksa menjual hasil yang tertentu tiap-tiap tahun kepada Belanda. Hasil-hasil itu dibayar dengan harga yang rendah dan yang ditentukan oleh VOC.

Rakyat Indonesia juga terpaksa membiarkan sebagian dari tanaman mereka tiap-tiap tahun sebagai upeti. Penyerahan paksa yang mereka namakan simpanan itu ditentukan besarnya. Sistem ini sangat menguntungkan VOC, tetapi mengundang kebencian rakyat.

Sementara itu barang-barang impor yang dimasukkan Belanda ke Indonesia, seperti kain, yang diharapkan akan terjual, ternyata rakyat tidak mampu membelinya lantaran daya beli yang sangat lemah. Akibatnya, perdagangan Belanda semakin kecil sementara kekuasaan politik mereka semakin bertambah besar.

5. Besarnya biaya untuk menghadapi perlawanan-perlawanan rakyat.

Pada waktu keuntungan semakin berkurang dan biaya pemerintahan semakin bertambah, VOC harus menghadapi perlawanan-perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia. Kondisi keuangan Belanda yang paling rendah terjadi pada pertengahan abad ke-18. Oleh karena itu perlawanan Bugis di Riau tahun 1783-1784 hampir dapat mengusir Belanda dari kota Malaka. Kota Malaka dapat diselamatkan oleh pasukan van Braam yang tiba tepat pada waktunya.

Peperangan dengan Mataram, Banten, Makasar, bahkan juga campur tangan Belanda dalam perang perebutan tahta di Mataram sampai tiga kali, terutama perang melawan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi, menelan banyak biaya. Beban keuangan itu semakin diperparah apabila perlawanan tersebut muncul bersamaan, seperti perang perebutan tahta di Jawa dan di Banten.

6. Pembagian keuntungan yang mengecewakan terhadap pemegang saham

Dalam membagikan keuntungan kepada para pemegang saham dalam kongsi dagang Belanda itu berlangsung secara tidak transparan.

Hal ini terpaksa dilakukan oleh VOC karena kongsi dagang itu berusaha untuk menyehatkan kembali keuangannya sehingga dapat melepaskan diri dari kebangkrutan.

Dalam pembagian keuntungan itu, kadang-kadang VOC memberikan keuntungan 50% dari modalnya pada saat kongsi itu tidak mendapat untung. Kebijakan itu menyebabkan para pemegang saham menyangka bahwa VOC adalah kongsi dagang yang menguntungkan bagi penanam modal.

Sewaktu perdagangan VOC mendapat sedikit keuntungan, para pemegang saham itu justru tidak diberi apa-apa. Akibatnya ketidaktransparanan itu mengundang penafsiran bahwa VOC menipu para pemegang saham. Ternyata dengan memberikan keuntungan yang besar pada saat VOC merugi dan akibatnya hutang VOC semakin besar.

7. Perang Inggris-Belanda dan Perancis 1780-1784

Permusuhan Inggris-Belanda dan Perancis dalam tahun 1780-1784 ternyata merupakan pukulan yang terakhir terhadap keuangan VOC. Perdagangan Belanda terhenti di semua kawasan akibat pengepungan Angkatan Laut Inggris yang sangat kuat, bahkan VOC terblokir. Sebagai akibat pula, maka dana yang dikeluarkan untuk menghadapi Inggris itu terlampaui besar untuk ditanggung oleh kongsi dagang yang sedang pailit itu.

Menurut Harrison, VOC tidak pernah pulih dari penderitaan perang tahun 1780-1784 itu. Dalam peperangan ini, pengiriman barang-barang dengan kapal-kapal pedagang Belanda tidak dapat lagi dilakukan karena hancurnya angkatan laut Belanda dalam pertempuran di Dogger Bank pada tahun 1781.⁶

Sebab-sebab merosotnya dan jatuhnya VOC mengambil waktu yang lama. Benih kemerosotan itu mengambil waktu 100 tahun untuk akhirnya meruntuhkan kekuasaan imperium perdagangan Belanda. Kritikan-kritikan yang hebat terhadap pelaksanaan monopoli itu baru mulai timbul dalam tahun 1774. Tetapi oleh karena tidak ada jalan lain lagi untuk memperoleh penghasilan yang tetap, maka sistem monopoli itu terus dilanjutkan.

Bertolak dari sistem yang dijalankan itu, maka para pakar berpendapat bahwa Belanda dengan VOC-nya bukan penjajah yang kejam tetapi loba dan tamak. Keruntuhan VOC terus berproses akibat buruknya pemerintahan dan perdagangan VOC akibat saingan dari

⁶ Brian Harrison, *South-East Asia: a short History*, New York, Macmillan, 1954, hal. 154.

lawan-lawannya. Namun menurut J.F. Cady, sebab utama keruntuhan VOC itu adalah kemerosotan atau penurunan taraf kerja pegawai-pegawainya.⁷

Sementara itu pakar sejarah Asia Tenggara yang lain banyak yang berpendapat bahwa sebab-sebab jatuhnya VOC yang utama karena VOC gagal memperoleh keuntungan yang cukup untuk membiayai perluasan wilayah. Hal ini bisa kita runut dari pendapat Harrison yang menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh tidak pernah melebihi biaya yang dikeluarkan.⁸

Beberapa sebab yang menyebabkan kongsi dagang Belanda itu mengalami kebangkrutan memang saling kait-mengkait. Jika dicoba untuk dicari sebab utama kejatuhan VOC itu, maka banyak persoalan baru yang muncul, ibarat menjawab pertanyaan: mana yang lebih dulu ada, telur atau ayam?

Jatuhnya VOC itu juga menyebabkan penderitaan bagi para penanam tanaman ekspor di Indonesia. Sebab dengan jatuhnya VOC itu maka berubah pula sistem politik dan ekonomi di Indonesia. Para penghasil tanaman ekspor harus mengikuti perubahan-perubahan harga yang cenderung merosot. Keadaan ini menimbulkan kemerosotan ekonomi yang hebat di kemudian hari.

Sesungguhnya pada pertengahan abad ke-18 Gubernur Jenderal Gustaaf van Imhoff melakukan usaha-usaha untuk mencegah kemerosotan ekonomi itu. Ia mengusulkan agar perdagangan dalam negeri dan perdagangan Asia dibuka untuk pedagang-pedagang perorangan dengan Batavia sebagai pusatnya. VOC itu bisa mendapatkan uang dengan memungut cukai terhadap kapal dagang dan barang-barang yang dibawa ke situ. Di samping itu, pada tahun 1745 didirikan Persatuan Candu guna mencegah penyelundupan candu, kemudian juga dilakukan perluasan perladangan di kawasan tanah tinggi Betawi guna menolong peladang sekaligus menambah masukan bagi VOC.

Dalam perkembangannya, rencana van Imhoff tersebut gagal karena meletusnya perlawanan Mangkubumi dan Raden Mas Said (1749-1757), serta Perang Banten. Setelah perang selesai, tahun 1757 Belanda melanjutkan usahanya lagi, yaitu dengan membina hubungan yang baik dengan raja-raja agar bisa kerjasama dengan mereka. Penanaman kopi dan tebu digalakkan, kemudahan-kemudahan

⁷ J.F. Cady, *South-East Asia Its Historical Development*, New York, McGraw-Hill, 1964, hal. 228.

⁸ Brian Harrison, *op. cit.*, hal.164.

pengangkutan dimajukan, dan pegawai-pegawai VOC dinaikkan gajinya. Tetapi hutangnya bertambah karena VOC membayar keuntungan yang tinggi sedangkan kongsi itu tidak mampu berbuat begitu, sementara beberapa peperangan dengan raja-raja semakin menguras keuangannya.

Peperangan-peperangan Napoleon di Eropa mengakibatkan perubahan pemerintahan di Nederland. Pada saat itu ternyata VOC sudah tidak dapat lagi melunasi hutangnya dan sedang porak-poranda pula. Hutangnya berjumlah 134 juta gulden. Akibatnya pada tanggal 31 Desember 1799 VOC pun dibubarkan. Kekuasaan terhadap semua tanah jajahannya diambilalih oleh Kerajaan Belanda.

Setelah VOC bubar, Indonesia diserahkan kepada pemerintah Belanda (Republik Bataaf). Pegawai-pegawai VOC menjadi pegawai pemerintah kolonial Belanda tersebut. Hutang VOC juga menjadi tanggungan pemerintah Belanda. Dengan demikian sejak 1 Januari 1800 Indonesia dijajah langsung oleh negeri Belanda. Sejak saat itu Indonesia disebut Hindia Belanda.

C. Indonesia Setelah Pergantian Kekuasaan

Setelah Indonesia menjadi Hindia Belanda, maka pemerintah Belanda mengangkat seorang Gubernur Jenderal di Hindia Belanda, yaitu van Overstraten. Ia berhasil menangkis serangan Inggris yang dipimpin Admiral Ball. Hal ini berkat bantuan raja-raja Jawa. Namun ancaman Inggris semakin meningkat.

Kalau kepentingan-kepentingan Belanda pada masa VOC terbatas pada kepentingan perdagangan, maka dalam periode ini Belanda mulai mengutamakan kepentingan politik. Belanda merebut supremasi perdagangan dari orang-orang Portugis, teristimewa perdagangan monopoli rempah-rempah. Kepentingan agama dan ekonomi membawa orang-orang Portugis ke dunia Timur, tetapi tidak lama kemudian kepentingan perdagangan menjadi lebih utama daripada kepentingan agama, dan dengan kedatangan orang-orang Belanda perdagangan itu menjadi tujuan yang utama.

Keinginan akan monopoli mendorong VOC melakukan penaklukan-penaklukan untuk merebut perdagangan rempah-rempah. Tujuan utama mengkonsentrasi perdagangan rempah-rempah itu lambat laun bergeser menjadi mengembangkan perkebunan-perkebunan besar yang hasilnya sangat laku di pasaran Eropa, seperti kopi, teh, gula, lada dan lain-lain.

Sistem eksploitasi dan monopoli tetap dipertahankan sewaktu

pemerintah Belanda mengambil alih administrasi VOC. Sampai pertengahan abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda memang masih menganggap perdagangan sebagai kepentingan fundamental, sedangkan kepentingan politik dan militer dianggap kurang esensial.⁹

Dalam kaitan dengan permasalahan tersebut ada dua soal yang perlu diterangkan. Pertama, dalam periode sebelum tahun 1850 ekspansi Belanda dapat disamakan dengan kolonialisme dalam arti marxistis, karena ada akumulasi modal dan kelebihan produksi di Negeri Belanda. Kedua, politik kolonial Belanda sesudah tahun 1850 harus diterangkan tidak hanya dari segi motif ekonomis saja, tetapi sifat dan sebab-sebabnya harus juga dipelajari dari segi perluasan militer, perluasan pegawai, perluasan politik dan agama, masing-masing sebagai faktor penentu atau faktor pembantu.

Motif-motif ekonomis memang menguasai politik kolonial Belanda, tetapi ini tidak berarti bahwa faktor-faktor lainnya boleh diabaikan. Bahkan sebaliknya, beberapa faktor menunjukkan bahwa sejarah imperialisme Belanda adalah manifestasi-manifestasi dari idealisme politik dan agama.

Mereka yang berusaha menerangkan imperialisme Belanda biasanya terperosok ke dalam kategori kaum diterminis ekonomis yang berpendapat, bahwa kapitalisme adalah satu-satunya manifestasi yang terorganisasi dari rezim kapitalis. Tidak dapat disangkal, bahwa memang ada hubungan fungsional antara kekuatan ekonomis dan politis, dan jelas bahwa perubahan-perubahan dan orientasi-orientasi baru pada politik kolonial Belanda itu sesuai dengan terjadinya tingkatan-tingkatan baru pada perkembangan ekonomi di Negeri Belanda. Tetapi tidak boleh diabaikan, bahwa negarawan-negarawan Belanda yang memegang pimpinan pandangan mereka tidak selalu ditujukan kepada kepentingan-kepentingan ekonomis. Mereka itu merupakan suatu mata rantai antara pelaksanaan yang senyatanya dari suatu politik yang sudah tertentu, dan kecenderungan-kecenderungan politik, ekonomi, dan sosial yang umum pada dewasa itu.

Dalam mendeskripsi pemerintah kolonial Belanda antara tahun 1800-1830, maka ada empat macam bidang garap yang dilakukannya. Kecuali faktor ekonomi, faktor-faktor lainnya adalah faktor politik, agama dan sosial. Dengan singkat dapat dikatakan, bahwa liberalisme, humanisme, kristianisme ikut serta dalam membentuk politik kolonial

⁹ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, jilid 2, Jakarta, PT Gramedia, 1990, hal. 4.

Belanda saat itu. Sudah cukup jelas sebab-sebab yang kompleks dari imperialisme Belanda, sehingga pendekatan multidimensional sangat diperlukan dalam studi kita tentang imperialisme Belanda tersebut.¹⁰

Sifat-sifat pokok dari politik kolonial Belanda dapat dicari dengan jalan mempergunakan ukuran analisis lain dan dengan jalan memperbandingkan dengan imperialisme negara-negara Eropa lainnya. Belanda membutuhkan hasil-hasil daerah tropis dan mendapatkannya harus secara pemungutan upeti, karena pada bagian pertama dari abad ke-19 mereka tidak mempunyai barang-barang untuk diperjualbelikan. Sebaliknya orang-orang Inggris, mereka ingin menjual kain-kain tenun. Kain-kain ini sebagai hasil dari Revolusi Industri, di Asia dapat diperjualbelikannya dengan harga yang lebih murah daripada kain tenun buatan penduduk pribumi.

Perbedaan fungsi tanah-tanah jajahan itu berakar pada perbedaan kondisi-kondisi ekonomis dari negeri-negeri induknya. Bagi Inggris, dengan industrinya yang sudah maju, perdagangan lebih menguntungkan dari pemungutan upeti, dan tanah-tanah jajahan dianggap sebagai pasar yang menguntungkan.

Belanda, setelah didominasi oleh Perancis selama dua puluh tahun, tidak mempunyai industri dan modal. Tanah jajahannya dianggap sebagai penghasil barang-barang ekspor yang dibutuhkan untuk perdagangannya. Pada penghabisan abad ke-19 politik ini diganti dengan politik kesejahteraan, karena kepentingan-kepentingan perdagangan ingin menciptakan suatu pasar di tanah jajahan dengan daya beli yang cukup besar.

Bertolak dari pembahasan tersebut di atas, jelaslah bahwa kepentingan-kepentingan di Indonesia sebagai tanah jajahan tergantung pada negeri induk, tidak menjadi soal politik kolonial apakah yang berlaku. Hanya mengenai caranya mencapai tujuan ada perbedaan antara ide dan politik Belanda, bahwa daerah-daerah taklukan harus memberi keuntungan material bagi Belanda, keuntungan yang memang menjadi tujuan penaklukannya.

Pendapat umum tentang tanah jajahan memang membenarkan, bahwa negeri induk itu mempunyai hak moral untuk menikmati segala keuntungan sebagai upah memerintah tanah jajahannya. Orang beranggapan bahwa surplus yang besar bagi perbendaharaan negeri induk adalah sesuai dengan kepentingan yang pokok dan permanen dari tanah-tanah jajahan.

Ideologi-ideologi politik yang besar di Eropa pada abad ke-19

¹⁰ *Ibid*, hal. 5.

sangat berpengaruh pada imperilisme dan politik kolonial Belanda. Liberalisme mulai berkembang di negeri Belanda pada periode sesudah Napoleon dan berhasil mengubah struktur politik pada kira-kira pertengahan abad itu.

Dalam masa empat puluh tahun berikutnya lahir politik kolonial yang lazim disebut politik kolonial liberal. Menjelang berakhirnya abad itu, sosialisme tumbuh sebagai kekuatan baru dalam politik Belanda dan segera tampil sebagai pendekar antikolonialisme.

Di dalam menyerang imperilisme, kritik mereka berbeda sekali dengan kritik kaum liberal. Pada pokoknya kaum sosialis mengutuk semua politik imperialisme sebagai alat kapitalisme, sedang kritik-kritik kaum liberal hanya mengenai detail-detail dari politik kolonial.

Posisi Negeri Belanda di dalam percaturan politik internasional mempunyai arti penting. Dapat dikatakan, bahwa karena perlindungan Inggrislah Belanda dapat mempertahankan posisinya di tanah seberang. Hal ini membawa akibat, Inggris dengan leluasa dapat mendesak sistem perdagangan bebas dan politik pintu terbuka untuk berdagang dan membuka perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Akhirnya, issue ekspansi kolonial pada semua kekuasaan kolonial sebenarnya adalah soal dari partai-partai politik dan taktik-taktik parlementer. Kerap kali persoalan kolonial itu bertautan dengan persoalan-persoalan lain. Sudah jelas bahwa pada abad ke-19 di Negeri Belanda opini umum dianggap sebagai hal yang benar. Ketidaktahuan rakyat tentang tanah-tanah jajahan bukanlah hal yang aneh dan orang tidak boleh berharap bahwa mereka akan menaruh perhatian kepada negeri-negeri asing yang ada di luar pengetahuannya.

Menyimak proses pemerintah kolonial Belanda di Indonesia awal abad ke-19, terbukti bahwa golongan idealis dan segolongan rakyat yang mempunyai kepentingan di tanah-tanah jajahan sangat berperan dalam pemerintahan. Kedua golongan itu mempunyai pengaruh politik, oleh karena ikut menentukan dalam membentuk sebagian besar politik kolonial.

D. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka tampaklah bahwa latar belakang terjadinya pergantian kekuasaan karena VOC bangkrut. Karena itu pada tahun 1800 di Indonesia telah terjadi pergantian kekuasaan dari tangan VOC ke tangan pemerintah Belanda. Mulai tahun 1800 itu pula Indonesia dikuasai langsung oleh Pemerintah Belanda, sehingga Indonesia dikenal sebagai Hindia Belanda. Sejak itu kekayaan

atau bahkan hutang-hutang VOC diambil alih oleh Pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda melanjutkan politik tradisional VOC dengan tujuan memperoleh penghasilan sebagai upeti dan laba perdagangan, semuanya demi keuntungan Negeri Belanda, dengan cara politik dan administrasi VOC dijalankan suatu sistem pemerintahan tidak langsung, pembesar-pembesar pribumi tetap mengurus perkara-perkara pribumi dan agen-agen Belanda dikuasakan mengawasi tanaman wajib yang hasilnya untuk pasaran Eropa.

Dengan sendirinya penyelewengan-penyelewengan yang terdapat pada sistem ini tidak dapat dihindari, misalnya, permintaan pegawai-pegawai Belanda yang melampaui batas atau pemerasan dari pembesar-pembesar pribumi. Sejak semula politik kolonial konservatif ini sudah mendapat kritikan pedas dari golongan liberal, yang menganjurkan suatu sistem pemerintahan secara langsung berdasarkan prinsip liberal dan perdagangan serta inisiatif swasta.

Politik kolonial liberal yang digelar sejak 1 Januari 1800 dijalankan oleh Gubernur Jenderal van Straten dan Gubernur Jenderal Daendels. Sedangkan sistem liberal baru mendapat kesempatan untuk pertama kalinya pada zaman Raffles (Inggris) yang hanya berlangsung selama 5 tahun (1811-1816), sebab setelah itu Indonesia dikuasai kembali oleh Belanda.

Daftar Pustaka

- Cady, J.F., *South East Asia a History Development*, New York, Mc Graw Hill, 1964.
- Day, Clive, *The Dutchin Java*, Kualalumpur, Oxford University Press, 1966
- Harrison, Brian, *South East Asia a Short History*, New York, Macmillan, 1954.
- Khoo, Gilbert, *Sejarah Asia Tenggara Sejak 1500*, Kualalumpur, penerbit Fajar Bakti, SDN BHD, 1976
- Prajudi Atmosudirdjo, *Sejarah Ekonomi Indonesia dari Segi Sosiologis Sampai akhir Abad XIX*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1984.
- Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme, Jilid 2*, Jakarta, PT Gramedia, 1980.

~~~~~



